

BAB III

Taman Siswa Pasca kemerdekaan (1945-1950)

1. Kondisi Republik dan Politik Pendidikan Taman Siswa di Awal Kemerdekaan

Perubahan cara berjuang Ki Hajar sebelum adanya Taman Siswa dan pasca adanya Taman Siswa, disebabkan Ki Hajar Dewantara percaya untuk membangun sebuah negara yang merdeka serta terbebas dari belenggu penjajahan tidak hanya menggunakan cara-cara politik namun juga pendidikan. Namun bukan pendidikan seperti yang diberikan oleh pemerintahan kolonial. Pendidikan ala pemerintahan kolonial tidak menghargai kebebasan murid dan guru hanya bertugas mentransfer ilmu tanpa pernah membangunkan kesadaran siswa tentang masyarakat dan lingkungannya.

Bagi Ki Hajar, pembebasan harus dilakukan lewat pendidikan dan pendidikan yang harus digunakan adalah pendidikan yang membebaskan. Pendidikan yang membebaskan merupakan proses pendidik mengkondisikan siswa untuk mengenal dan mengungkap kehidupan yang senyatanya secara kritis.¹ Sedangkan, yang terjadi adalah pemerintahan kolonial Belanda menggunakan pendidikan sebagai sebuah cara untuk menciptakan buruh murah dan sama sekali tidak menyentuh kesadaran siswa guna melanggengkan kekuasaannya di Indonesia.

¹ Paulo Freire, *Politik Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) h, 176

Namun perjuangan lewat pendidikan tidak sepenuhnya berdiri sendiri, pendidikan tidak akan berjalan lancar tanpa adanya politik. Politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut proses untuk menentukan dan melaksanakan tujuan-tujuan yang sifatnya publik (umum). Pada konteks ini, politik bisa diartikan sebagai pembuatan sebuah regulasi atau aturan.

Demi upaya melanggengkan kekuasaannya pemerintah kolonial Belanda juga menerapkan politik pendidikan untuk keperluan mereka, seperti pembagian kelas, penggunaan bahasa pengantar yang berbeda antara sekolah rakyat dan sekolah anak Belanda, serta akses ke jenjang pendidikan berikutnya. Bahkan dalam penerimaan murid pun diberlakukan pembedaan terhadap anak pemerintah Belanda, anak bangsawan, dan anak rakyat biasa.

Pengambilan kebijakan program dan kebijakan sekolah di zaman pemerintahan kolonial Belanda tidak terlepas juga dari pertimbangan politik. Pada hal ini politik pendidikan yang banyak diterapkan pemerintah tentu memperhatikan betul pertimbangan politik demi kepentingan Belanda. Ki Supriyoko² di dalam salah satu tulisannya memberikan jabaran dan batasan wilayah kajian dari politik pendidikan, yaitu sebagai berikut.

1. Politik pendidikan adalah metode yang digunakan untuk mempengaruhi pihak lain untuk mencapai tujuan pendidikan
2. Politik pendidikan lebih berorientasi pada bagaimana tujuan pendidikan dapat dicapai

² Ketua Pendidikan dan Kebudayaan Majelis Luhur Taman Siswa Yogyakarta dan Anggota Dewan Kehormatan Guru Indonesia dan direktur Program Pascasarjana Universitas Tamansiswa Jogjakarta

3. Politik pendidikan berbicara mengenai bagaimana metode untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya tentang anggaran pendidikan, kebijakan pemerintah, dan partisipasi masyarakat.³

Lebih jauh mengenai politik pendidikan sebuah bangsa, Kartini Kartono memberikan sebuah narasi bagaimana kondisi pendidikan dan manusianya. Di dalam tulisannya, Kartini kartono menjelaskan bahwa di negara totaliter kebebasan individu dikekang, dan pendidikannya harus berdasarkan apa yang diterapkan oleh pemerintah sebagai wujud pembentukan manusia sebagai alat kekuasaan atau Negara. Sementara itu, di negara oligarkis pendidikan hanya menekankan kepada anak bangsawan. Sebab, dalam negara oligarkis negara dikuasai oleh beberapa orang atau golongan. Sedangkan, di negara kapitalis sistem pendidikannya lebih menekankan kepada siapa yang mampu membayar alhasil pendidikan hanya diperuntukan bagi mereka yang memiliki uang.

Politik pendidikan dapat digunakan untuk menerangkan pola-pola kebijakan dan proses pendidikan dalam masyarakat. Dalam buku Politik Pendidikan, M. Sirozi mengambil definisi politik pendidikan menurut Kimbrough. Kimbrough mengatakan bahwa politik adalah proses pembuatan keputusan-keputusan penting yang melibatkan masyarakat luas, dan bertitik tolak dri pengertian itu Kimbrough (1964 :7) berpendapat bahwa politik pendidikan merupakan “*The process of making basic educational decisions of local district – wide state-wide, or nation-wide significance*” (Proses

³ Muhammad Rifai, *Politik Pendidikan nasional* (Yogyakarta: Arruz Media, 2011) h, 30

pembuatan keputusan penting dan mendasar dalam bidang pendidikan di tingkat lokal maupun nasional).⁴

Pada konteks zaman kolonial Belanda hanya anak Eropa dan bangsawan yang memiliki uang untuk bersekolah di sekolah kelas satu. Itu pun, tidak ditanamkan kesadaran guna mengubah masyarakat dan cenderung berpikir bagaimana menaikkan status dirinya dan keluarganya serta pemulangan biaya sekolah. Politik pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda bersifat sangat diskriminatif terhadap peserta didik maupun terhadap sekolah swasta atau sekolah partikelir jika menggunakan istilah pemerintah kolonial yang termasuk di dalamnya ialah Taman Siswa yang didirikan Ki Hajar Dewantara yang menggunakan kebudayaan Jawa sebagai medium pengajarannya ataupun K.H Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah yang menggunakan agama sebagai medium pengajarannya.

Keterkaitan antara pendidikan dan politik berimplikasi pada semua dataran, baik pada tataran filosofis maupun tataran kebijakan. Misalnya filsafat pendidikan di suatu negara sering kali merupakan refleksi prinsip ideologis yang diadopsi oleh negara tersebut.⁵ Di Indonesia, filosofi pendidikan adalah perwujudan dari nilai UUD 1945, pada tataran pembuatan kebijakan sangat sulit memisahkan antara kebijakan-kebijakan pendidikan dengan ideologi politik yang dianut pemerintah.

Pendirian Taman Siswa sebagai sebuah antitesa dari sekolah pemerintah kolonial Belanda adalah bukti tegas bahwa Ki Hajar menggunakan

⁴ M.Sirozi, Ph.D., *Politik Pendidikan* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005), h.84

⁵ *ibid* h. 12

pendidikan sebagai jalan lain yang harus di tempuh untuk mencapai kemerdekaan dan sebagai refleksi dari gagasan tentang pendidikan dari seorang Ki Hajar. Taman Siswa menolak menggunakan kurikulum seperti yang diajarkan oleh sekolah kolonial. Sehingga, Taman Siswa menyusun sendiri kurikulum dan bahan ajar sebagai politik pendidikan yang diambil Taman Siswa dalam mendirikan sekolah. Para pemimpin Taman Siswa membuat keputusan mengenai jalannya pembelajaran dan memastikan bahwa keputusan –keputusan ini diimplementasikan dan diterapkan dengan baik. Mereka juga mempersiapkan generasi muda untuk memasuki kehidupan yang akan langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Pemerintah kolonial Belanda tidak tinggal diam dan terus melakukan intimidasi terhadap sekolah partikelir tersebut. Intimidasi pemerintah kolonial Belanda terhadap sekolah partikelir dibuktikan lewat pemberlakuan ordonansi sekolah liar yang membuat ruang gerak Taman Siswa terhambat, seperti pemberlakuan pajak, klasifikasi guru, bahan ajar, dll. Namun, pemerintah kolonial Belanda menjanjikan akan memberikan subsidi jika sekolah partikelir mau menuruti dan mengikuti model sekolah yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai salah satu cara untuk mematikan sekolah yang berpotensi mengganggu stabilitas di tanah jajahan.

Hal yang menarik adalah perbedaan politik pendidikan yang diambil Sekolah Muhammadiyah dengan Taman Siswa. Dalam memajukan pendidikan Muhammadiyah K.H. Hisyam mau bekerjasama dengan pemerintah kolonial dengan bersedia menerima bantuan keuangan dari pemerintah kolonial. Walaupun jumlahnya sangat sedikit dan tidak seimbang dibandingkan sekolah Eropa. Hal ini yang menyebabkan K.H. Hisyam dan

Muhammadiyah mendapatkan kritikan keras dari Taman Siswa dan Sarikat Islam yang saat itu melancarkan politik non-kooperatif.⁶ Muhammadiyah mau menerima syarat yang diajukan pemerintah kolonial Belanda. Namun, Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa mengambil politik pendidikan yang berbeda, Taman Siswa menolak mengikuti pemerintahan kolonial dan berusaha membangun pendidikannya sendiri dengan usaha sendiri. Hal ini yang membuat Taman Siswa sangat kredibel membahas pendidikan.

Muhammadiyah beralih, menerima subsidi tersebut lebih baik daripada menolaknya. Sebab, jika subsidi tersebut ditolak, maka subsidi tersebut akan dialihkan pada sekolah-sekolah pemerintah kolonial Belanda yang notabene akan melanggengkan dan memperkuat posisi Belanda di Indonesia. Kekalahan Belanda dari Jepang juga turut mengubah politik pendidikan berbagai sekolah tidak terkecuali Taman Siswa, kemenangan besar Jepang atas Belanda memunculkan optimisme di kalangan tokoh pergerakan saat itu bahwa Jepang akan membawa perubahan dan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia.

Jika pada saat Belanda berkuasa Taman Siswa sangat non-kooperatif dan menolak bantuan dari Belanda, maka di zaman Jepang, Taman Siswa sedikit kooperatif dan menerapkan politik kepompong. Taman Siswa diam namun tetap bergeliat didalamnya, termasuk ketika taman dewasa dibubarkan dan diubah menjadi Taman Tani dan Taman Rini karena menganggap bahwa kekuatan besar Jepang dapat dimanfaatkan untuk meraih kemerdekaan.

⁶ <http://www.muhammadiyah.or.id/content-158-det-kh-hisyam.html> (diakses pada 5 Juni 2016 Pukul 12:03)

Namun ternyata dalam perang Jepang mengalami kekalahan, Kekalahan Jepang dari sekutu di Perang dunia ke II dengan menjatuhkan bom atomnya di daerah Hiroshima dan Nagasaki. Hal itu mengakibatkan Jepang menyerah tanpa syarat. Kekalahan Jepang di Perang dunia II menimbulkan keuntungan bagi negara jajahannya, salah satunya adalah Indonesia. Berita akan kekalahan Jepang langsung dimanfaatkan oleh para pejuang kemerdekaan untuk mengambil momentum proklamasi.

Pada peristiwa Rengasdengklok, golongan muda menculik Soekarno guna menjauhkan dari pengaruh golongan tua yang tetap menunggu janji kemerdekaan dari Jepang, akhirnya setelah melakukan lobi dan persiapan di rumah Laksamana Maeda maka naskah proklamasi disusun. Rumah laksamana Jepang itu dianggap tempat yang aman dari tindakan Pemerintah Militer Angkatan darat. Kedudukan Maeda sebagai kepala kantor penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat memungkinkannya berhubungan dengan Mr. Ahmad Subardjo dan sejumlah pemuda Indonesia yang bekerja pada kantornya.⁷

Pada 17 Agustus 1945 Soekarno ditemani dengan Hatta memproklamkan kemerdekaan Indonesia di kediaman Soekarno, Pegangsaan Timur No.56. Demi menjaga keamanan, maka para pemuda dan prajurit Pembela Tanah Air (PETA) dikerahkan. Di samping itu para masyarakat yang semula berada di lapangan Ikada telah beralih ke rumah Bung Karno untuk menyaksikan peristiwa bersejarah, terlihat pula banyak tokoh yang salah satunya adalah Pemimpin Taman Siswa Ki Hajar Dewantara.

⁷Poesponegoro. *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta :Balai Pustaka,2009), h.141

Proklamasi kemerdekaan Indonesia artinya membuka lembaran baru dalam fase perjalanan Indonesia yang sebelumnya merupakan negara jajahan Belanda dan Jepang yang kemudian menjadi negara yang merdeka dan mencoba membangun serta menjalankan negaranya sendiri. Menjadi sebuah negara baru yang merdeka tentunya menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia yang memang sudah lama memperjuangkan kemerdekaan. Bung Karno memaparkan bahwa usaha meraih kemerdekaan telah berlangsung ratusan tahun dan mengenai perjuangannya hanya tampaknya saja Indonesia menyandarkan diri pada Jepang. Namun, sesungguhnya Indonesia yang menyusun kemerdekaannya sendiri.

Peristiwa besar ini hanya berlangsung kurang lebih satu jam dengan penuh khidmat. Sekalipun bendera yang dijahit oleh Fatmawati tidak sejajar dan pengibaran bendera merah putih seadanya, namun ini menjadi peristiwa besar yang bersejarah. Setelah itu, masih banyak tugas menunggu para pemimpin sesudah proklamasi yaitu menyusun tatanan kehidupan bernegara.

Indonesia menyusun sendiri tatanan pemerintahannya seperti mengangkat Soekarno dan Hatta menjadi Presiden dan Wakil presiden, menentukan provinsi, serta mengangkat menteri guna menjalankan roda pemerintahan republik yang baru lahir ini. Sempat ada bersitegang mengenai rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dibuat tanggal 22 Juni 1945, khususnya mengenai kalimat “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Hal ini menjadi perdebatan karena dianggap mendiskriminasikan agama lain, namun akhirnya dengan lobi dan argumentasi yang mengarah kepada konsolidasi

nasional maka kata-kata tersebut diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus, perubahan-perubahan tidak hanya terjadi dalam bidang pemerintahan saja, tetapi dalam bidang pendidikan. Perubahan yang terjadi di bidang pendidikan merupakan perubahan yang sifatnya mendasar, yaitu perubahan yang menyangkut penyesuaian kebijakan pendidikan dengan dasar dan cita-cita suatu bangsa yang merdeka dan negara yang merdeka. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia seperti yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945, kemudian dijadikan landasan utama pendidikan di Indonesia.⁸ Meskipun sistem dan perubahan Undang-Undang Dasar kerap terjadi namun dasar falsafah negara tidak berubah Oleh sebab itu, pancasila diterapkan sebagai landasan pendidikan Indonesia.

Kondisi Indonesia yang masih sangat carut–marut membutuhkan perhatian serta kerja keras dari segenap rakyat Indonesia untuk membenahi dan mempertahankan republik yang masih amat sangat muda. Usaha ini tidak terlepas dari organisasi-organisasi dan laskar-laskar didalamnya, termasuk Taman Siswa. Meskipun Taman Siswa tetap mengerjakan sebagaimana mestinya organisasi dan laskar pada waktu itu dalam hal mempertahankan kemerdekaan, namun sebagai organisasi yang bergerak dibidang pendidikan dan kebudayaan tetap menjalankan fungsinya yaitu menyelenggarakan sekolah, ditengah kondisi masyarakat yang sedang giat bergerilya.

⁸ Muhammad Rifai, *Sejarah Pendidikan Nasional* (Jogjakarta: Arruz Media, 2011), h.122

Dalam usaha mempertahankan republik, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa, namun para siswa yang sudah besar ikut bertempur dan guru-guru pun tidak bisa menahan keinginan para siswa tersebut karena takut akan dicap mengkhianati revolusi. Apabila waktunya bertempur maka anak-anak tersebut dengan gagah berani akan maju ke medan perang. Namun, jika keadaan sedikit tentram maka kembali ke sekolah dan belajar seperti biasa.

Untuk menyelenggarakan urusan pendidikan, Republik yang kala itu baru berdiri memang sangat bergantung kepada sekolah-sekolah yang telah ada, sementara pemerintah menyusun sistem pendidikan nasional. Pendidikan masyarakat bagi pemerintah saat itu adalah salah satu hal yang ditekankan dan cukup penting karena untuk melangsungkan sebuah pembangunan yang sifatnya besar dan menyeluruh diperlukan sumber daya manusia yang banyak dan berkualitas. Sementara, sumber daya manusia yang banyak dan berkualitas hanya dapat diperoleh dari pendidikan.

Pada 1945 rakyat Indonesia yang dikatakan terdidik atau mengecap pendidikan sangat sedikit jumlahnya yaitu hanya 7,4% dari seluruh penduduk Indonesia yang ada pada saat itu.⁹ Selain kebutuhan akan masyarakat mengenyam pendidikan, belum terpenuhinya sekolah untuk masyarakat, dan pemberantasan buta huruf juga menjadi masalah pada saat awal berjalannya republik. Pemerintah Indonesia menyiasati hal tersebut dengan mendirikan “Bagian Pendidikan Masyarakat” dibawah kementerian P, P dan K di Solo. Hal ini diharapkan mampu menjadi solusi ditengah keadaan darurat dalam kaitannya dengan pemberantasan buta huruf serta menciptakan masyarakat

⁹ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200- 2008*, (Jakarta : PT.Serambi Ilmu Semesta, 2010), h.495

yang terdidik. Namun, bukan berarti tidak adanya usaha dari masyarakat seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam pandangan rapat “Panitia Adat dan Tatanegara dahulu”.

Sebenarnya dari pihak rakyat sendiri sudah sejak lama nampak usaha hendak memberantas buta huruf dikalangan rakyat ini. Pertama, perkumpulan-perkumpulan perempuan yang didalam kongres Puteri Indonesia mewajibkan anggota masing-masing membantu memberantas buta huruf. Kedua, pemimpin pemuda-pemuda juga. Ketiga, partai-partai dan kumpulan rakyat, misalnya rukun tani yang tersebar di seluruh Jawa Timur dan lain-lain daerah, sudah mengadakan peraturan yang boleh disamakan dengan kewajiban mengajar membaca dan menulis.¹⁰

Dari pidato tersebut bisa dilihat bahwa telah ada usaha dari masyarakat guna membuat masyarakat Indonesia untuk melek huruf dan menciptakan SDM yang berguna untuk membangun Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah masih bergantung kepada sekolah-sekolah tersebut. Salah satunya adalah Taman Siswa yang banyak berperan dalam pemberantasan buta huruf yang menjadi momok di awal kemerdekaan yang membutuhkan banyak orang terdidik guna menciptakan masyarakat terdidik sesuai amanat pancasila.

Ketika zaman Jepang Taman Dewasa dan Umum dibubarkan dan diganti dengan Taman Tani dan Taman Rini dari segi mata pelajaran masih tetap dimasukan materi pelajaran umum dan penanaman nilai kebangsaan seperti yang dilakukan pada sebelum dibubarkannya Taman dewasa. Disamping pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah-sekolah rakyat, pemerintah guna semakin mensistematiskan pembuat sistem pendidikan nasional, menunjuk Ki Hajar Dewantara untuk mengisi posisi Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan. Pengangkatan disebabkan sepak terjang dan sumbangsih pemikiran Ki Hajar dalam bidang pendidikan sejak 1922.

¹⁰ Ki Hajar Dewantara, *KI HADJAR DEWANTARA Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka* (Yogyakarta: UST –Press, 2013), h.145

Pengangkatan Ki Hajar Dewantara menjadi Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan menjadi sebuah kebanggaan sekaligus menjadi sebuah pertanyaan tersendiri bagi Taman Siswa mengenai eksistensi Taman Siswa di zaman kemerdekaan. Pertanyaan tersebut muncul menyusul dengan dipilihnya Ki Hajar menjadi Menteri serta perubahan kondisi dari zaman kolonial ke zaman kemerdekaan. Hal ini yang menjadi pertanyaan dan memunculkan tiga pendapat.

Pertama bahwa tugas Taman Siswa telah selesai dengan tercapainya Indonesia merdeka. Sebab, menurut pendukung pendapat ini peran Taman Siswa sebagai penggugah keinsafan nasional sudah habis, dan faktor melawan pemerintahan jajahan tidak ada lagi. Kedua, Taman Siswa masih perlu ada, sebelum pemerintah republik dapat mengadakan sekolah-sekolah yang mencukupi keperluan rakyat. Lagipula isi sekolah-sekolah negeri pun belum dapat diubah sekaligus sebagai warisan sistem pengajaran yang lampau. Ketiga, sekolah-sekolah partikelir yang memang mempunyai dasar tersendiri tetap diperlukan, walaupun nantinya jumlah sekolah sudah cukup dan isinya juga sudah nasional.¹¹

Pergeseran pendapat dikalangan Taman Siswa ini ternyata kemudian membawa akibat –akibat yang tidak bisa dielakkan. Para pendukung pendapat pertama akhirnya banyak yang meninggalkan perguruan untuk menjadi pegawai pemerintah atau bekerja di lapangan lain. Tentu hal ini membawa masalah bagi Taman Siswa karena kehilangan sebagian pendukung aktif yang

¹¹ Abdurrachman Surjomihardjo, *Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa dalam Sejarah Modern* (Jakarta : Sinar harapan , 1986) h.162

kala masa sebelum kemerdekaan menjadi garda terdepan bagi perjuangan Taman Siswa.

Sementara itu, mereka yang mendukung pendapat kedua dan ketiga tetap berusaha menjalankan Taman Siswa. Mereka berpendapat, meskipun sekolah sudah ada namun belum ada sebuah sistem nasional yang mengikat dan menyeluruh untuk seluruh wilayah republik ditambah lagi jumlahnya yang juga belum mencukupi untuk seluruh anak di Indonesia. Tidak mengherankan sebenarnya ketika banyak pendukung dan kader Taman Siswa yang bekerja di sektor lain.

Hal ini tidak terlepas dari secara historis Taman Siswa yang sejak dahulu memang sudah banyak menerima kaum-kaum pergerakan dari bermacam-macam organisasi. Sebut saja Soekarno dan Ali Sastromidjojo yang menjadi guru Taman Siswa ditengah keterlibatannya di PNI yang menjadi bukti bahwa kader Taman Siswa sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan pun telah banyak bekerja di luar lingkungan Taman Siswa. Keikutsertaan guru-guru Taman Siswa dalam berjuang mempertahankan republik dan banyaknya kader yang memilih bekerja dengan pemerintahan Indonesia semakin memperkuat argumen bahwa harus ada reorientasi Gerakan Taman Siswa di zaman kemerdekaan.

Perubahan dari zaman penjajahan kolonial Belanda, Jepang, hingga kemerdekaan memang memerlukan perubahan pembacaan dan perubahan strategi, ini juga yang dialami oleh Taman Siswa dikala perubahan dari Pemerintahan kolonial Belanda ke Jepang. Perubahan yang dilakukan ketika zaman kolonial hanya sebatas strategi agar sekolah bisa terus berjalan namun

perubahan yang lebih besar terjadi ketika kemerdekaan sudah berhasil diraih, alhasil strategi dan orientasi gerakan pun harus disusun agar sadar dengan keadaan zaman.

Demi menjawab semua fenomena yang terjadi di Indonesia serta internal Taman Siswa maka Majelis Luhur pada Bulan Agustus 1946 mengadakan Rapat Besar yang ke IX di Yogyakarta untuk merundingkan beberapa masalah berhubung dengan suasana baru dalam alam kemerdekaan.¹² Selain ketiga pendapat mengenai jalannya Taman Siswa kedepan hal yang dibahas di dalam rapat besar adalah mengenai peraturan Taman Siswa dengan segala isinya. Salah satunya tentang subsidi. Seperti kita tahu bahwa Taman Siswa adalah organisasi yang sangat asing dengan kata subsidi atau bantuan pendidikan, Pemimpin Umum Taman Siswa Ki Hajar Dewantara bahkan pernah menolak bantuan uang dari seorang kawannya dengan alasan tidak mau terikat dan mau hidup mandiri.

Kemandirian Taman Siswa dibuktikan pula pada pidato PPPKI yang menekankan kepada forum mengenai perlunya berdiri dengan usaha sendiri, seperti yang ditulis Ki Hajar dalam artikel yang berjudul “Pendidikan Nasional” pada bulan Juli 1938 :

Menurut anggaran dasar kita dilarang untuk menerima pemberian, yang mengikat kita baik lahir maupun batin, sebaliknya pemberian yang benar-benar tulus ikhlas tidak bisa ditolak. Kita tidak boleh menggantungkan diri kepada bantuan orang lain, karena kita pada dasarnya telah berniat untuk berdiri diatas kaki sendiri. Ini pertama-tama menghidupkan kepercayaan kepada diri sendiri, keduanya membangkitkan energi kita, sedang pada akhirnya dengan adanya penetapan itu kita semua dipaksa, untuk selalu mengusahakan kesederhanaan dan kesahajaan, dua sifat yang begitu perlu dalam tiap pendidikan.¹³

¹² Sajoga, *Riwayat Perjuangan Taman Siswa 1922-1952*, dalam *Taman Siswa 30 Tahun* (Yogyakarta : UST Press, 1952), h.270

¹³ Ki Hajar Dewantara, *KI HADJAR DEWANTARA Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka* (Yogyakarta: UST –Press, 2013), h.62

Di samping itu pembacaan ulang relevansi Azas 1922 pada zaman kemerdekaan juga menjadi wacana besar Taman Siswa dalam menghadapi zaman kemerdekaan. Oleh sebab itu, rapat besar IX memutuskan bahwa Taman Siswa harus tetap ada untuk menjaga cita-cita yang sudah ditanamkan Ki Hajar Dewantara dan Paguyuban Selasa Kliwon sejak tahun 1922 seperti yang Ki Hajar Dewantara katakan dalam artikelnya yang berjudul Azas-Azas dan Dasar –Dasar Taman Siswa :

Pemerintah kita kini adalah pemerintah nasional dan kementerian pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan pada dasarnya kini bersamaan maksud dan tujuan dengan kita, sekalipun dalam beberapa hal mengenai “isi”nya masih banyak perbedaan paham tentunya. Ini disebabkan karena tiap-tiap menteri harus menyesuaikan diri dengan golongan-golongan lain yang ada dalam masyarakat (golongan islam, kristen, katolik, nasionalis, sosialis dan komunis, golongan progresif liberal, konservatif, dan sebagainya) pula harus dapat persetujuan dari kabinet seluruhnya dan wajib takluk pada partai politiknya. Hal ini perlu kita mengerti, karena inilah yang menjadi salah satu alasan bagi Taman Siswa (RBU 1946) untuk memutuskan akan tetap hidupnya Taman Siswa dan tetap memelihara cita-citanya yang disamping dasar-dasarnya yang nasional masih juga mempunyai sifat kekhususan hingga masih tetap ada perbedaan dengan golongan nasional lainnya.¹⁴

Pada tulisan tersebut Ki Hajar menekankan bahwa Taman Siswa harus terus ada dan meneruskan cita-cita yang telah dicanangkan sejak awal pembentukan Taman Siswa, Ki Hajar juga meneruskan dalam tulisan tersebut mengenai perlunya Taman Siswa beradaptasi dengan alam dan pemerintahan yang baru seperti lanjutan tulisan Ki Hajar Dewantara dalam Azas-Azas dan Dasar-Dasar Taman Siswa :

Taman Siswa perlu menyesuaikan dirinya dengan segala keadaan serta masyarakat yang kini ada di dalam negara dan zaman kita sekarang ini, Sikap Non cooperation misalnya terhadap pemerintah harus kita ganti dengan sikap baru yakni bekerja sama dan membantu, karena pemerintah yang terikat oleh U.U.D yang berjiwa nasional dan demokratis.¹⁵

Artinya Ki Hajar Dewantara dalam tulisannya sudah mulai mengusulkan bahwa Taman Siswa harus berdiri bersama pemerintah dalam

¹⁴ Ki Hajar Dewantara, *Azas- Azas dan Dasar- Dasar Taman Siswa*, dalam *Taman Siswa 30 Tahun*, (Yogyakarta : UST Press, 1952), h.57

¹⁵ *Ibid.* 54

menghadapi zaman baru berikut dengan segala sistemnya. Meskipun kekhususan dan kekhasan Taman Siswa akan terus dijaga seperti sebelum 1945. Artinya, dalam hal ini Ki Hajar Dewantara berpendapat tidak mendukung pendapat nomor satu yang mana cita-cita Taman Siswa sudah selesai. Bagi Ki Hajar, Taman Siswa harus terus ada karena bagaimanapun pemerintah yang baru ini masih perlu bantuan Taman Siswa dalam menyelenggarakan sekolah.

Menurut, Ki Hajar pemerintah tidak mungkin mencukupi kebutuhan rakyat akan belajar dan bersekolah jika tidak dibantu oleh sekolah-sekolah yang dibangun oleh rakyat. Lebih lanjut, Ki Hajar menerangkan bahwa dalam negara yang demokratis dan mengutamakan hak asasi manusia, harus ada kesempatan sebesar-besarnya bagi tiap-tiap golongan yang berideologi untuk mendirikan sekolah guna memelihara cita-citanya tersebut.

Tugas pemerintah hanya menjaga agar cita-cita sekolah tersebut masih dalam koridor Indonesia dan tidak menyalahi ketertiban serta keamanan umum. Oleh sebab itu, masih tetap ada dan berjalannya Taman Siswa adalah bagian dari keputusan penting yang diambil Taman Siswa pada 1946 dan bukti bahwasanya sekolah yang dibangun oleh rakyat harus tetap ada sekalipun sudah dalam keadaan merdeka. Namun, mengenai sikap mengikuti Pendidikan Nasional atau tidak serta pembahasan mengenai perubahan azas 1922 akan di bahas di rapat besar umum 1947 disebabkan dalam internal Taman Siswa masih ada yang tetap berpegang teguh Taman Siswa memiliki dasar sendiri yang terlepas dari pendidikan nasional.

Sikap Taman Siswa dalam menerapkan politik pendidikannya di awal zaman kemerdekaan memang masih belum sepenuhnya mengikuti pendidikan nasional. Meski demikian, perjuangan Taman Siswa tidak pernah terlepas dari politik nasional. Sejak didirikannya Taman Siswa, Masa diam, Adanya Undang-Undang pengajaran (*Onderwijd Ordonantie*), datangnya Jepang, hingga kemerdekaan Indonesia, Taman Siswa dan Ki Hajar selalu ikut ambil bagian dalam dinamika meraih hingga mendapatkan kemerdekaan. Bahkan Ki Hajar dewantara sendiri sejak dipilih menjadi salah satu anggota PUTERA lebih banyak menghabiskan waktu di Jakarta, sehingga kegiatan politiknya di tahun sekitaran 1943—1945 banyak dihabiskan di Jakarta membantu tokoh pergerakan dalam mewujudkan kemerdekaan nasional.

Persinggungan dengan pemerintahan nasional inilah yang membuat mendesaknya kongres guna menjawab kejelasan garis perjuangan Taman Siswa. Kongres Taman Siswa pada 1946 adalah bentuk dari ketanggapan taman Siswa akan berubahnya kondisi negara. Kemerdekaan Indonesia dengan UUD 1945 dan Pancasilanya adalah lembaran baru bagi pelaksanaan azas 1922. Oleh sebab itu, untuk merespon itu di azas ini ditemukanlah Panca dharma sebagai dasar-dasar Taman Siswa, yang berisi kemerdekaan, kodrat alam,kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan.¹⁶

Namun, rumusan ini tidak segera dilaksanakan atau diresmikan disebabkan harus melewati sedemikian alur yang nantinya akan disahkan di Rapat Besar Umum ke V Taman Siswa di Tahun 1947. Demi mencapai itu maka dibentuklah Panitia yang akan membahas dan meninjau kembali

¹⁶ Abdurrachman Surjomihardjo, *Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa dalam Sejarah Modern* (Jakarta : Sinar harapan , 1986), h.98

peraturan serta azasnya yang dipimpin oleh Sarmidi Mangoensarkoro¹⁷ atau yang lebih dikenal dengan Ki Mangoensarkoro. Oleh sebab itu, di tahun ini selain merumuskan *panca dharma* sebagai respon dari kemerdekaan Indonesia, juga memutuskan bahwa Taman Siswa akan tetap ada dan tetap menjadi organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Keputusan inilah yang menjadi awal bagi jalannya Taman Siswa di zaman kemerdekaan.

Masa Jabatan Ki Hajar Dewantara sebagai menteri yang hanya tiga bulan (19 Agustus 1945—14 November 1945) ternyata tidak lantas membuat Ki Hajar bisa kembali fokus terhadap Taman Siswa. Sebab, Mr. Suwandi selaku menteri pengajaran, pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan surat keputusan nomor 104/Bhg. Tertanggal 1 Maret 1946 untuk membentuk panitia penyelidikan pengajaran dibawah pimpinan Ki Hajar Dewantara dan Soegarda Poerbawatja dengan tugas :

1. Merencanakan susunan baru dari tiap-tiap macam sekolah
2. Menetapkan bahan pengajaran dengan mempertimbangkan keperluan praktis dan jangan terlalu berat
3. Menetapkan rencana pelajaran untuk tiap jenis sekolah termasuk fakultas.¹⁸

Pembentukan panitia tersebut mengisyaratkan bahwa Taman Siswa harus segera dan secepatnya menyusun kembali aturan serta dasar-dasar

¹⁷ Ki Mangunsarkoro atau Sarmidi Mangunsarkoro lahir di Raja Kasunanan Surakarta, 1893-1939 Surakarta, 23 Mei 1904. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga pegawai Keraton Raja Kasunanan Surakarta, ia mendapat mandat untuk menjabat sebagai Ketua Departemen Pendidikan dan Pengajaran Majelis Luhur Tamansiswa yang sekaligus merangkap Pemimpin Umum Tamansiswa Jawa Barat. Setahun kemudian, ia memegang tampuk kepemimpinan Taman Dewasa Raya di Jakarta yang secara khusus mengurus bidang Pendidikan dan Pengajaran.

¹⁸ Ary. H. Gunawan, *Kebijakan pendidikan di Indonesia* (Jakarta : Bina Aksara, 1985) , h.34

organisasi untuk segera digunakan di zaman kemerdekaan. Sementara, Ki Hajar berjuang di luar menciptakan sistem pendidikan yang kelak akan menjadi sistem pendidikan nasional yang akan digunakan untuk anak-anak Indonesia. Untuk menjembatani sistem pendidikan nasional maka diperlukan alat, dan alat ini adalah sekolah. Membuka sekolah adalah salah satu cara pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan manusia yang sesuai dengan amanat pancasila dan UUD 1945.

Permasalahannya adalah pembuatan sekolah di kala zaman mempertahankan republik yang penuh dengan perang, ancaman disintegrasi, dan masalah lainnya adalah sebuah tantangan besar yang dihadapi pemerintah Indonesia karena sebagian dana dipakai untuk kebutuhan mempertahankan republik. Meski demikian pemerintah tetap berupaya membuat sekolah dan di sinilah peran sekolah-sekolah semacam Taman Siswa yang tetap membantu pemerintah dalam menyelenggarakan sekolah. Sementara pemerintah masih berjibaku menemukan sistem serta formula yang cocok bagi sekolah yang akan dibangun, Taman Siswa konsisten menggunakan sistem yang telah dibuat sejak 1922 meskipun harus dimodifikasi agar sesuai dengan keadaan zaman.

2. Taman Siswa tahun 1947 dan Rapat Besar Umum 1947

Usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia di awal-awal kemerdekaan menjadi sebuah tantangan bagi negara Indonesia. Belanda yang sudah dikalahkan Jepang pada 1942 ternyata kembali dengan ambisi menguasai kembali Indonesia. Belanda datang kembali ke Indonesia dengan diboncengi sekutu yang menamakan dirinya *Netherland Indies Civil Administration* (NICA). tentu hal ini membuat pemerintah harus berusaha

keras dalam mempertahankan republik. Seluruh rakyat Indonesia bersiap dan membentuk laskar dalam usaha mempertahankan republik dari ambisi Belanda menguasai kembali Indonesia, pemerintah pusat juga membentuk tentara republik guna semakin memperkuat keamanan dan pertahanan.

Dalam keadaan genting dan tegang, Taman Siswa masih menjadi salah satu garda terdepan dalam menyelenggarakan pendidikan. Namun di satu sisi, tetap menjadi bagian dari gerilyawan yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia seperti yang dikatakan Ki Sunarno, sekolah lazimnya akan tetap menyelenggarakan sekolah pada siang hari, dan setelah itu para murid yang sudah dewasa dan guru akan bergabung dengan para gerilyawan, para guru sebetulnya sudah melarang murid dalam ikut bergerilya dengan alasan keselamatan. Namun justru murid-murid akan merasa malu dan takut dianggap tidak revolusioner jika tidak ikut dalam gerilya.¹⁹

Pada awal Januari 1946, keadaan Jakarta sangat tidak aman, maka diputuskanlah untuk memindahkan ibu kota republik. Kediaman resmi presiden, wakil presiden, dan sejumlah anggota kabinet dipindahkan keluar Jakarta. Pilihan jatuh di Yogyakarta. Tepatnya pada 4 Januari 1946, secara diam-diam Soekarno, Hatta, bersama beberapa menteri dan keluarga mereka meninggalkan rumah di Jalan Pegangsaan Timur No.56, Jakarta dari pintu belakang dengan lokomotif beserta sejumlah gerbongnya yang telah siap.²⁰ Tidak semua pindah termasuk Kantor Perdana Menteri yang memang ditugaskan untuk melakukan hubungan dengan negara lain dan melakukan negoisasi dan diplomasi dengan Belanda.

¹⁹ Wawancara dengan Ki Sunarno tanggal 12 April 2016 di Taman Siswa Jakarta

²⁰ Rushdy Hoesein, *Terobosan Sukarno dalam perundingan Linggar Jati* (Jakarta : Kompas, 2010), h. 172

Diplomasi yang dilakukan guna menghentikan ambisi Belanda ternyata justru merugikan Indonesia, karena setelah diplomasi justru daerah Indonesia menjadi menyusut menjadi Jawa, Sumatera, dan Madura. Banyak pihak yang kecewa terhadap hasil perundingan yang diketuai oleh Perdana Menteri Sjahrir ini, Sjahrir pun menuliskan dalam edaran kementerian penerangan sebagai berikut:

*Several events following upon the signing of the Linggarjati draft agreement made the relations between the Dutch and ourselves of distrust increased so that any happening, any step and move of one party added to the distrust of the other. All happenings only seem to be a failure and source of dissatisfaction clouding the spirit and darkening the view of the parties concerned”.*²¹

“Beberapa peristiwa setelah penandatanganan perjanjian Linggarjati membuat terjadinya ketidakpercayaan hubungan diantara Belanda dan diri kita (Republik) meningkat. Setiap langkah dan gerakan dari suatu pihak menimbulkan ketidakpercayaan lain. Semua terjadi hanya melihat kegagalan dan sumber kekecewaan dan mengaburkan semangat pandangan pihak-pihak yang terkait”

Pasca perundingan Linggarjati 25 Maret 1947, yang sebetulnya merugikan Indonesia, ternyata membuat Indonesia mulai mendapat perhatian internasional khususnya Dewan Keamanan PBB. Ketegangan–ketegangan baru timbul karena perbedaan tafsir mengenai isi persetujuan yang telah dibuat. Pihak Belanda tidak dapat menahan diri dan melancarkan agresi militer pada 21 Juli 1947, akibatnya timbul reaksi dari seluruh dunia. Masalah Indonesia dimasukkan ke dalam acara sidang Dewan Keamanan pada 31 Juli 1947.²² Dewan Keamanan memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak, yang dimulai pada 4 Agustus 1947.

Agresi militer yang dilakukan oleh Belanda dan carut-marut di republik tidak membuat Taman Siswa turun semangat dan memutuskan untuk tetap mengadakan kongres besarnya / R.B.U yang ke-5 pada Desember 1947 di

²¹ *Political Statement By Prime Minister Sutan Sjahrir*, Kementerian Penerangan, Arsip Nasional R.I

²² Poesponegoro. *Sejarah Nasional Indonesia VI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), h.215

Yogyakarta. Agresi ini memunculkan masalah kedudukan cabang-cabang Taman Siswa di daerah pendudukan. Dengan kejadian ini pula terbukti, bahwa pendapat “tidak adanya faktor melawan pemerintah jajajan” seperti dikemukakan oleh sebagian orang Taman Siswa dalam Rapat Besar 1946 tidaklah mutlak.²³

Pendudukan yang dilakukan oleh Belanda adalah bukti bahwa penjajah dan penjajahan masih ada dan harus terus dilawan. Jika pada 1930-an Pemerintah kolonial Belanda menyebut sekolah-sekolah di luar sekolah yang dibangun pemerintah kolonial Belanda adalah “sekolah liar”, maka ketika Belanda melakukan pendudukan kembali kepada daerah republik, sekolah-sekolah pun kembali disebut dengan sekolah liar. Namun, bukan hanya Taman Siswa dan sekolah partikelir yang disebut “sekolah liar”, sekolah yang dibangun pemerintah Indonesia pun disebut “sekolah liar”. Pendudukan yang dilakukan oleh Belanda berdampak pada penutupan sekolah-sekolah liar tersebut, seperti yang terjadi di Jakarta. Sekolah yang dibangun pemerintah Indonesia tutup dan Gedung Taman Siswa Jakarta kedatangan murid-murid yang terkena dampak penutupan sekolah dikarenakan memang Taman Siswa tidak menutup sekolahnya seperti sekolah lain.

Sebenarnya Majelis Luhur di Yogyakarta tidak menyetujui diteruskannya sekolah di daerah pendudukan, karena berpendirian pengajaran harus dihentikan di daerah pendudukan atau dijadikan sedemikian sehingga pemerintah dari tentara pendudukan tidaklah mungkin berjalan.²⁴ Artinya Majelis Luhur melihat bahwa pengajaran yang dilakukan di daerah

²³ Abdurrachman Surjomihardjo, *Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa dalam Sejarah Modern* (Jakarta : Sinar harapan , 1986), h.162

²⁴ Ibid, h.163

pendudukan khawatir akan digunakan oleh Belanda dalam menanamkan kembali pengaruhnya di Indonesia.

Mohammad Said Reksohadiprojo atau yang lebih dikenal Ki Said²⁵, ketua Taman Siswa Jakarta menolak alasan itu dan dengan dukungan seluruh guru di Taman Siswa Jakarta. Lantas, ia mengambil keputusan untuk tetap menjalankan sekolah seperti biasa atau jika Majelis Luhur tetap bersikukuh dengan keputusannya maka Taman Siswa Jakarta akan mengubah nama. Demi meyakinkan Majelis Luhur di Yogyakarta, maka Ki Said ke Yogyakarta, dan memperoleh izin untuk melakukan pengajaran di tempat pendudukan.

Keberanian cabang-cabang Taman Siswa dalam menjaga kemerdekaan juga ditunjukkan dengan mengibarkan bendera merah putih di sekolah Taman Siswa sebagai bukti masih ada daerah yang tidak diduduki oleh Belanda dan membuktikan eksistensi Republik Indonesia. Berhubung dengan keadaan ini, maka seorang wartawan Belanda Dolf Verspoor, memberi nama yang tepat bagi gedung jalan Garuda 25, yaitu “Benteng republik yang terakhir di Jakarta” (*The Last republican fortress in Jakarta*).²⁶

Beberapa guru di cabang Taman Siswa juga ditahan oleh Pasukan Belanda dan di beberapa cabang bendera merah putih dilarang berkibar. Pelarangan tersebut disiasati dengan anak murid menggunakan pakaian warna merah putih. Persamaan nasib dengan perguruan telah menjelma menjadi

²⁵ Dikenal sebagai Pamong dan Ketua Tamansiswa Cabang Jakarta, yang terletak di Jl. Garuda 25, Kemayoran, Jakarta. Pada waktu NICA dengan membonceng Serdadu Inggris menguasai Jakarta tahun 1945-1946 dan ibukota hijrah ke Yogyakarta, tetap bertahan di Tamansiswa Jakarta dan mengibarkan Bendera Merah Putih setiap hari. Ia dikenal dekat para seniman terkenal, seperti Chairil Anwar, Affandi, dan Sitor Situmorang

²⁶ Abdurrachman Surjomihardjo, *Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa dalam Sejarah Modern* (Jakarta : Sinar harapan , 1986), h.165

perasaan nasionalisme yang mendalam. Sama halnya seperti sebelum 1945, Taman Siswa tetap berjuang baik di ranah pendidikan maupun di ranah politik, maupun medan perang.

Dinamika dan problema yang terjadi menjelang R.B.U tidak membuat kongres batal atau diundur, terbatasnya hubungan dengan beberapa cabang disebabkan berada didaerah pendudukan tidak membuat kendur semangat Taman Siswa. R.B.U tetap dilakukan pada 22—24 Desember 1947 guna menyempurnakan pekerjaan Taman Siswa lebih lanjut. Pembicaraan dan rancangan yang sudah dibuat pada 1946 di bawah pimpinan Ki Mangunsarkoro dan Panitia Mangunsarkoronya. Oleh sebab itu, pada 1947 dijelaskan penjabaran hasil dari pembaruan dari azas 1922 yang sudah harus disesuaikan dengan zaman yang baru ini.

Setelah diselidiki oleh panitia ternyata mengambil kesimpulan bahwa dasar 1947 bukan hanya azas pembaruan dari azas 1922, melainkan lebih dari itu adalah program perjuangan Taman Siswa, adapun azas tersebut ada lima yaitu : 1.Kemerdekaan, 2.Kodrat Alam, 3.Kebudayaan, 4.Kebangsaan, dan 5.Kemanusiaan.²⁷

Lima dasar tersebut atau yang lebih dikenal dengan Panca Dharma. Artinya program perjuangan yang sebelumnya atau yang tertulis di azas 1922 sebagian dibekukan dan diperbarui lewat dasar-dasar 1947. Hal itu disebabkan kemerdekaan nasional sudah diraih. Penggantian yang dilakukan Taman Siswa ini tidaklah menyalahi aturan ataupun menghianati perjuangan Taman Siswa dan Cita-cita Perkumpulan Selasa Kliwon seperti yang

²⁷ Sajoga, *Riwayat Perjuangan Taman Siswa 1922-1952*, dalam *Taman Siswa 30 Tahun*, (Yogyakarta:UST Press,1952) ,h.270

dipaparkan Ki Hajar dalam artikelnya yang berjudul Azas-Azas dan Dasar –
Dasar Taman Siswa :

“Dasar-dasar 1947” itu sama sekali tidak menyalahi atau bertentangan dengan “Azas 1922”. Ini perlu dikemukakan agar kita dapat mengerti bahwa maksud “perjanjian pendirian” tadi tidak sekali-kali dibatalkan. Yang nyata ialah : adanya susunan baru yang merupakan “keterangan dasar-dasar Taman Siswa” tahun 1947 yaitu “Beginselverklaring”, sedangkan isinya diambil dari “Keterangan Azas tahun 1922, yakni azas perjuangan”²⁸

Dalam pernyataan tersebut Ki Hajar coba menjelaskan tentang hubungan antara Azas 1922 dan Dasar 1947, merupakan bagian dari dinamika Taman Siswa dalam menghadapi zaman yang baru. Namun, Ki Hajar menegaskan kembali jika ada peraturan pemerintah Indonesia yang bertentangan dengan azas Taman Siswa maka Taman Siswa mungkin menghidupkan kembali azas 1922 yang kini sebagian besar sudah dibekukan.

Mengenai lima dasar tersebut tidak ada urutan khusus yang digunakan tidak seperti halnya pancasila. Pancasila harus sesuai urutannya 1. Ketuhanan yang maha esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal itu adalah sesuatu yang pasti baik susunan kata maupun urutannya. Beda halnya dengan Panca Dharma yang urutannya bisa diubah-ubah.

Dipilihnya panca dharma sebagai bagian dari perjuangan baru Taman Siswa yang disusun oleh Ki mangusarkoro sebagai ketua panitia memiliki makna sebagai berikut : 1.Kemerdekaan diartikan sebagai disiplin pada diri sendiri oleh diri sendiri atas dasar nilai hidup yang tinggi. Baik hidup sebagai

²⁸ Ki Hajar Dewantara, *Azas- Azas dan Dasar- Dasar Taman Siswa*, dalam *Taman Siswa 30 Tahun*, (Yogyakarta : UST Press,1952) , h.57

individu maupun anggota masyarakat, kemerdekaan harus menjadi alat pengembangan pribadi yang kuat dalam suasana yang penuh keselarasan dengan masyarakat. 2. Kodrat Alam diartikan sebagai manusia tidak boleh terlepas dari alam dan kehendaknya, dan akan mengalami kebahagiaan jika menyatukan diri dengan kodrat alam. 3. Kebudayaan diartikan sebagai, Taman Siswa tidak asal memelihara kebudayaan kebangsaan, tetapi jauh dari itu kebudayaan kebangsaan itu harus membawa kearah kemajuan yang sesuai dengan kecerdasan zaman, kemajuan dunia dan kepentingan hidup rakyat lahir dan batin pada tiap-tiap zaman dan keadaan. 4. Kebangsaan diartikan memiliki satu rasa dengan bangsa sendiri, dalam suka maupun duka dalam kehendak menuju kepada kebahagiaan hidup lahir dan batin seluruh bangsa namun tetap tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan. 5. Kemanusiaan diartikan sebagai rasa cinta kasih terhadap sesama manusia dan mahluk tuhan yang membawa kemajuan manusia baik lahir maupun batin, dan kasih sayang ini harus melawan segala sesuatu yang merintangai kemajuan dan keselarasan dengan kodrat alam.²⁹

Lebih jauh mengenai azas kemerdekaan Panitia Mangunsarkoro juga mengingatkan tentang pengalaman Taman Siswa semenjak berdirinya hingga terselenggarakannya RBU 1947. Penegakan azas kemerdekaan oleh Taman Siswa yaitu dengan menolak segala perintah, paksaan, dan tekanan yang jika dituruti pasti akan melenyapkan kebebasan Taman Siswa. Sikap Taman Siswa yang menolak tawaran untuk mendapat subsidi. Sikap Taman Siswa menolak membayar pajak rumah tangga karena Taman Siswa beranggapan bahwa sekolah Taman Siswa bukan milik perseorangan, melainkan berdiri

²⁹ Ibid.h 58

sebagai wakaf merdeka dan terlepas dari Ki Hajar Dewantara sebagai pendiri namun bukan bertindak sebagai pemilik. Terakhir Ki Mangunsarkoro juga menceritakan tentang Taman Siswa yang menolak membayar pajak-upah, karena Taman Siswa bukan kaum buruh yang bekerja untuk majikan.

Selain tentang Panca Dharma, R.B.U ke V Tahun 1947 juga membicarakan subsidi, dalam rapat tersebut diutarakan bahwa Taman Siswa tidak minta subsidi dari pemerintah Indonesia. Namun jika diberi maka Taman Siswa akan menerima, akan tetapi di lain sisi, ada pula yang menghendaki bahwa subsidi untuk Taman Siswa harus diminta dan mekanisme inilah yang nanti diatur oleh Majelis Luhur dengan alasan bahwa jamannya telah berubah. Sebetulnya sejak 1946 telah ada keterbukaan dari Taman Siswa membicarakan persoalan subsidi, dan diperkuat oleh argumen dari Ki Hajar tetapi nampaknya masih ada yang tetap ingin mempertahankan bahwa Taman Siswa harus berdiri diatas kaki sendiri seperti sebelum 1945.

Kekhawatiran yang diungkapkan adalah khawatir jika Taman Siswa nanti akan menjadi sekolah umum biasa tanpa kekhususannya dan dengan subsidi akan tidak kuat dalam rangka menjalankan asas dan dasarnya semula, namun perihal subsidi ini telah menjadi kesepakatan bersama dalam R.B.U Tahun 1947 dengan argumen bahwa ini adalah zaman kemerdekaan, dan Taman Siswa berperan dalam meraih kemerdekaan tersebut, sehingga pemerintahan nasionalnya pun tidak terlepas dari andil Taman Siswa. Maka tidak akan mengikat seperti halnya subsidi di zaman Belanda atau ketika Taman Siswa dengan terpaksa menerima subsidi dari Jepang untuk membuka sekolah Tani.

Rapat Besar Umum 1947 tidak hanya melahirkan Panca dharma dan keputusan mengenai subsidi yang menjadi sebuah perbincangan serius dikalangan Taman Siswa. Taman Siswa bukan sebuah organisasi yang anti-subsidi, melainkan menolak jika itu akhirnya justru mengikat dan menggadaikan kemerdekaan diri terhadap kepentingan si empunya subsidi. Selain itu Rapat Besar Umum 1947 juga membuat struktur pengurusan baru yang lebih mengakomodir semua kalangan di Taman Siswa termasuk memasukan anggota dari Wanita Taman Siswa, Ikatan keluarga Taman Siswa, dan Pemuda Taman Siswa. Komando pemimpin umum tetap dipegang oleh Ki Hajar. Meskipun, Ki Hajar banyak bekerja di bidang lain atau dalam hal ini di luar Taman Siswa. Sebab, sebagian sepak terjang dan kurikulum serta dasar Taman Siswa merupakan buah pikiran Ki Hajar Dewantara.

Perwakilan dari Wanita Taman Siswa diwakili oleh Nyi Satrijowibowo, Dari Ikatan Keluarga Taman Siswa oleh Hertog dan Abdoel Moeis dari Persatuan Pemuda Taman Siswa. Penambahan perwakilan dari berbagai kalangan merupakan upaya Taman Siswa agar terus bertahan dikala banyaknya anggota yang memutuskan keluar dan bekerja di lapangan lain, disatu sisi ini adalah cara Taman Siswa melakukan regenerasi agar organisasi tetap berjalan tanpa ada kemandekan pengurusan

3. Politik Pendidikan Taman Siswa 1948—1950

Keadaan republik Indonesia dan Taman Siswa saat itu bisa dikatakan hampir mirip, karena kedua-duanya mengalami keadaan yang cukup kacau. Republik Indonesia pasca agresi Militer Belanda I masih harus menjalani

diplomasi dengan Belanda yang memunculkan perjanjian Renville. Pada awalnya perjanjian ini hendak dilakukan di Jakarta. Namun, Indonesia menolak dengan alasan perjanjian harus dilakukan di luar daerah pendudukan. Lalu atas usul Komisi Tiga Negara (KTN) akhirnya perundingan dilaksanakan di atas kapal pengangkut pasukan Angkatan Laut Amerika “USS Renville”.

Perundingan ini akhirnya dimulai pada 8 Desember 1947 di atas kapal Renville yang berlabuh di teluk Jakarta. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Widjojoatmodjo, Seorang Indonesia yang memihak Belanda.³⁰ Salah satu isi perjanjian tersebut adalah bahwa Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Akhirnya, seluruh pasukan RI harus meninggalkan daerah pendudukan dan menuju daerah yang diakui sebagai bagian dari RI.

Carut marutnya keadaan Republik Indonesia diperparah dengan adanya pemberontakan dari PKI di Madiun yang dipimpin oleh Musso, tentu keadaan Republik Indonesia semakin kacau karena harus dihadapkan kepada berbagai persoalan yang silih berganti. Perjanjian Renville yang telah ditandatangani ternyata dilanggar oleh Belanda. Pelanggaran yang dilakukan oleh Belanda pasca perjanjian Renville dilaporkan oleh Kepala bagian pemerintahan umum tanggal 10/11/1948 berdasarkan pelaporan Tuan Asisten Wedono Kebumen dengan no.1132/dx/v/1 dilaporkan kepada sekretariat umum Delegasi RI sebagai bahan protes.³¹

³⁰ Sudharmono, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949* (Jakarta: Sekretariat Republik Negara Indonesia, 1981), h.55

³¹ Arsip Nasional R.I

Pelanggaran yang dilakukan oleh Belanda menambah buruk keadaan republik. Keadaan yang kian carut-marut semakin diperparah dengan adanya agresi Militer Belanda II yang langsung menyerang ke pusat ibu kota republik di Yogyakarta. Keadaan kacau juga dialami oleh Taman Siswa, Pasca R.B.U yang ke-5 Tahun 1947 di Yogyakarta keadaan Taman Siswa tidak juga membaik. Meski sudah menyusun dasar baru guna beradaptasi dengan lingkungan baru dan menyusun susunan struktur baru. Bongkar pasar anggota dan pengurus Majelis Luhur membuat kerja-kerja Taman Siswa menjadi terhambat. Kekosongan pengurus dan tambal sulam kepengurusan dilakukan Taman Siswa guna menjalankan roda organisasi akibatnya adalah kemandekan dalam kerja-kerja organisasi.

Sebagai negara yang bercita-cita mencerdaskan segenap rakyat Indonesia, pemerintah tetap bertanggung jawab atas pendidikan di Indonesia. Salah satu caranya ialah memberi subsidi kepada Taman Siswa untuk melaksanakan pendidikan. Hal tersebut tentu tidak ditolak Taman Siswa berdasarkan kesepakatan R.B.U tahun 1947. Melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal 14 April 1948 di Surakarta No.9/A Rahasia kepada 5 perguruan Taman Siswa di Jawa Timur, 5 di Jawa Tengah, dan 3 di Jawa Barat diberikan subsidi sekaligus biaya penyelenggaraan sebesar masing-masing Rp. 44.000, Rp.50.000, dan Rp.28000. Jumlah Rp.122.000.³² Subsidi bukanlah hal tabu lagi bagi Taman Siswa seperti yang ditulis di Majalah Pusara Maret 1950 :

³² Sajoga, *Riwayat Perjuangan Taman Siswa 1922-1952*, dalam *Taman Siswa 30 Tahun*, (Yogyakarta:UST Press,1952) ,h.274. Jika Dikonversi dalam kurs rupiah saat ini 1USD = 13.161 dengan Kurs rupiah saat itu 1USD = 3,80 maka jumlahnya secara berturut adalah sekitar Rp.152.372.000, Rp. 173.150.000, Rp. 94.964.000, dan Rp.422.486.000. Untuk daftar kurs bisa dilihat di <http://berilmu.com/blog/sejarah-nilai-tukar-rupiah-dari-tahun-ke-tahun/>

1. Djaman Pendjajahan dahulu Taman Siswa akan diberi subsidi oleh pemerintah, kita tolak, tidak mau menerima. Djaman Republik ini bahkan kita minta subsidi.
2. A. Sebelum aksi Militer kedua tjabang2 TS didaerah republik telah kami mintakan subsidi, dan permintaan tersebut dikabulkan semua, jaitu untuk 13 buah bagian, Taman Muda dan 12 buah bagian Taman Dewasa, semua mulai bulan agustus 1948, masing2 menurut surat putusan menteri pendidikan , pengajaran, dan kebudayaan tertanggal surakarta 14 Oktober 1948 no.9213/A dengan mata anggaran 6.17.16 P.P.K. untuk Taman Muda di : 1. Dampit, 2. Turen, 3. Donomuljo, 4.Pare, 5.Tulungagung, 6.Kediri, 7. Djombang, 8.Maturen, 9. Ngawen, 10.Blora, 11. Tjepu, 12. Djetis Djogja, 13. Ibu Pawijatan Jogjakarta dan no 9348/A dengan mata anggaran 6.17.1.2 P.P.K untuk Taman Dewasa di. 1. Ibu Pawijatan Jogjakarta, 2. Ngawen, 3. Djuwana, 4. Kudus, 5. Tjepu, 6. Babat, 7. Djombang, 8. Madiun, 9. Kediri, 10. Tulungagung, 11. Turen, 12. Kependjen. Untuk Taman Madya Ibu Pawijatan telah djuga kami mintakan dan dapat menurut putusan menteri tertanggal 12 April 1948 no.3383/A dengan mata anggaran 6.17.12.PPK.³³

Subsidi diberikan untuk Taman Siswa dalam rangka menyelenggarakan pendidikan, dan pengurus Taman Siswa menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang perak dll. Karena pada saat itu mata uang rupiah merosot jauh. Kekacauan politik yang terjadi di Madiun ternyata juga menimbulkan korban di pihak Taman Siswa. Karenanya roda organisasi di Madiun tidak berjalan maksimal. Belum selesai Madiun, Belanda melakukan agresi Militer ke Yogyakarta dalam rangka menguasai Ibu kota RI.

Keadaan darurat tersebut, maka Majelis Luhur Taman Siswa mengambil keputusan untuk menutup perguruan Taman Siswa selama enam setengah bulan, karena dirasa kondisi Yogyakarta dalam keadaan tidak aman dan sebagai gantinya anggota Taman Siswa ikut bergerilya bersama pasukan Republik Indonesia. Sementara di luar Yogyakarta mungkin lebih lama lagi mengalami vakum organisasi. Selama enam setengah bulan penutupan Taman Siswa, bukan berarti kegiatan sepenuhnya vakum. Kegiatan tetap dilakukan meskipun dengan sembunyi-sembunyi, melakukan apa saja asal tidak berkhianat. Dampak langsung agresi dan pemberontakan PKI Madiun bagi

³³ Pusara Maret 1950, h.13

Taman Siswa adalah berjatuhnya korban jiwa dan tersendatnya pembelajaran di daerah yang dilalui konflik.

Untuk menghadapi itu semua perlawanan diberikan oleh pemerintah republik, selain cara diplomasi yang kerap dilakukan guna menyelesaikan konflik berkepanjangan antara Republik Indonesia dan Belanda. Gerilya yang dilakukan pasukan Indonesia dan dorongan dari dunia internasional membuat Belanda mau berunding dengan Indonesia dan melakukan perjanjian Roem-Royen. Sehari setelah pengakuan kedaulatan, sebagai hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 28 Desember 1949, Presiden Sukarno kembali ke Jakarta. Secara otomatis fungsi Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan Republik berakhir. Untuk kali pertama, Konstitusi menunjuk ibukota negara. Dalam pasal 68 Konstitusi RIS disebutkan, “Pemerintah berkedudukan di ibukota Jakarta, kecuali jika dalam hal darurat pemerintah menentukan tempat yang lain.”³⁴ Sejak 1 Juli 1949 Keadaan Yogyakarta kembali tenang dan sekolah Taman Siswa dibuka kembali dengan keadaan yang seadanya.

Taman Siswa di Yogyakarta kembali beroperasi setelah beberapa bulan mengalami kevakuman. Pasca perundingan Roem Royen diplomasi kembali dilakukan dan memunculkan Konferensi Meja Bundar. Diplomasi yang dilakukan RI di Konferensi Meja Bundar memunculkan kesepakatan baru dan kerjasama dalam bidang kebudayaan seperti yang tercantum didalam pasal 23 menetapkan peraturan tentang kerjasama antara Indonesia dengan Belanda dilapangan kebudayaan. Peraturan itu juga sudah disahkan oleh KMB, menyatakan pada kata pembukaannya bahwa kedua negara berkeinginan

³⁴ Budi Setiyono, *Kembali Ke Jakarta*, Historia, 19 April 2010

hendak memajukan hubungannya dilapangan pengajaran, pengetahuan, dan kebudayaan umumnya.³⁵ Hal ini tentu menjadi sebuah permasalahan bagi Ki Hajar dan Taman Siswa yang memang sudah sejak awal meyakini bahwa pendidikan adalah usaha kebudayaan, dan kebudayaan nasional adalah sari-sari dari kebudayaan lokal. Ki Hajar mengkritik keras pasal tersebut karena Ki Hajar beranggapan bahwa pasal tersebut justru akan merugikan Indonesia seperti yang Ki Hajar katakan dalam majalah Pusara :

“Persetujuan kebudajaan seperti sudah ditetapkan oleh KMB itu, seolah-olah berupa kelanjutan dari usaha kolonial Belanda di negeri kita juga dilakukan diluar lapangan politik. Dengan adanya peraturan2 juga khusus itu seolah-olah segala kebebasan dan kesukarelaan menjadi dasar2 yang kosong belaka sedangkan pertimbal balikan justru melemahkan atau membatalkan kebebasan dan mengganti kesukarelaan menjadi keharusan semata-mata juga dalam pelaksanaannya lalu menjadi paksaan belaka. Menurut kami maka Persetujuan kebudajaan yang telah ditetapkan di KMB itu benar2 bertentangan dengan tjita2 rakyat kita, yang sedjak 17 Agustus 1945 telah mempunyai anggapan yang pasti tentang apa yang disebut kebudayaan nasional dalam lingkungan kemerdekaan bangsa dan negara”.³⁶

Keresahan yang dilatarbelakangi dengan perjanjian KMB, menurut Ki Hajar membawa permasalahan di bidang kebudayaan dibawa ke R.B.U taman Siswa ke VI yang akan diadakan pada 1—5 Maret di Yogyakarta. Kongres VI, ini juga semakin menegaskan posisi Taman Siswa yang mengikuti kebijakan pendidikan pemerintah. Kongres VI ini juga menetapkan Wakil Majelis luhur serta pembantunya, dan menghapus konsulat Majelis luhur yang semula berfungsi untuk mengkoordinasikan cabang-cabang yang ada di luar daerah republik Indonesia.

Ketika masa agresi selesai dan keadaan sudah lebih aman maka fungsi konsulat ditiadakan sehingga semua koordinasi kembali ke Majelis Luhur yang berpusat di Yogyakarta. Dalam kongres ini Taman Siswa banyak

³⁵Ki Hajar Dewantara, *Persetujuan kebudayaan dalam KMB*, Agustus 1950, h.25

³⁶ *Ibid*, h.29

mengeluarkan politik pendidikan yang sangat penting bagi perjalanan Taman Siswa sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, Keputusan yang diperoleh dalam kongres VI diantaranya :

1. Rencana peraturan besar Taman Siswa keputusan R.B.U tahun 1947 Dengan beberapa perubahan diterima baik
2. Preadvis Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan dan kebudayaan dasar-dasarnya diterima
3. Tentang bahasa asing dalam Taman Siswa : di Taman Dewasa : Bahasa Inggris, sedang di Taman Madya : Bahasa Inggris, Perancis, Jerman ; Fakultatif : Bahasa Tionghoa, Arab, Hindustan.
4. Terhadap keputusan konferensi pendidikan antar Indonesia tentang sekolah menengah umum 6 tahun yang dibagi menjadi 2-2-2 dalam prinsipnya diterima untuk merupakan bahan bagi majelis luhur guna diperjuangkan supaya dipakai oleh Pemerintah selekas-lekasnya
5. Majelis Luhur yang baru dibentuk oleh tiga orang formatur yang dipilih oleh Rapat Besar Umum yaitu ,Saudara – Saudara : Moch. Tauchid, Moh. Said, dan Soedarminta.³⁷

Perubahan struktur juga dilakukan pada kongres ini, Jika sebelumnya Ki Hajar Dewantara memegang jabatan Pemimpin umum dan Ketua Majelis Luhur maka di Kongres ini, ketua Majelis Luhur diserahkan kepada Soedarminta dan Ki Hajar Dewantara tetap sebagai bapak dan Pemimpin

³⁷ Sajoga, *Riwayat Perjuangan Taman Siswa 1922-1952*, dalam *Taman Siswa 30 Tahun*, (Yogyakarta:UST Press,1952) ,h.276

Umum Taman Siswa. Keadaan yang mulai aman juga turut memunculkan permintaan dari berbagai tempat untuk mendirikan cabang baru atau mengoperkan sekolah-sekolah untuk dikelola Taman Siswa. Majelis Luhur akhirnya menyatakan rekomendasi yang isinya ialah membuka kembali cabang Taman Siswa yang sebelumnya ditutup akibat carut-marutnya keadaan republik, mendirikan cabang baru, dan mengoperasikan suatu sekolah yang diberikan kepada Taman Siswa.

Majelis luhur juga menambahkan agar menjaga cabang yang telah ada dan memperhatikan guru, gedung, kelengkapan, uang sekolah, dan hal-hal yang diperlukan lainnya. Setelah disetujuinya *Preadvis* Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan kebudayaan yang diuraikan pada 3 dan 4 Maret 1950. Kongres membahas perihal persetujuan KMB yang mengenai kerjasama di bidang kebudayaan yang menurut Ki Hajar Dewantara dapat merugikan dan membahayakan kebudayaan dan kebangsaan Indonesia yang sedang dalam masa pembangunan setelah beberapa tahun terakhir terus berkonflik dan mengalami pasang surut sebagai bagian dari diplomasi. Kongres VI taman Siswa akhirnya memutuskan sebuah keputusan mengenai pejanjian KMB dalam lapangan kebudayaan seperti yang ditulis dalam majalah Pusara :

Memutuskan :

Mentjegah dengan sekuat-kuatnja akan timbulnja bahaya pendjajahan kebudajaan jang disebabkan karena pengleksanaan persetudjuan KMB dilapangan kebudajaan dengan djalan :

- a. Bersama –sama dengan seluruh rakyat umumnya, dan badan2 kebudayaan khususnya, memelihara dan menjaga kebudayaan kebangsaan kita, agar terlepas dari bahaya tersebut
- b. Menjokong politik pengajaran Republik Indonesia
- c. Mendesak agar supaya undang-undang2 pokok pengajaran R.I yang sudah disetujui dan diterima oleh B.P.K.N.I.P segera dilaksanakan untuk seluruh Indonesia.³⁸

Pasal kedua menegaskan bahwa Taman Siswa akan mendukung politik pengajaran meskipun di dalam Taman Siswa memiliki kekhususan yang sudah sejak lama ada dan menjadi bagian dari Taman Siswa. Dalam pidatonya ketika menteri P.P.K berkunjung ke Taman Siswa, Ketua Majelis Luhur sdr. Sudarminta bahwa Taman Siswa adalah sebuah badan yang berusaha menanamkan benih-benih nasional, Oleh sebab itu, Taman Siswa tidak segan menolak kebijakan Pemerintah kolonial Belanda, tetapi ketika keadaan sudah berubah sehingga tidak relevan jika masih bersikap non-kooperatif seperti yang dilakukan di zaman kolonial. Perubahan zaman turut mengubah keadaan sehingga banyaknya anggota Taman Siswa yang keluar dan membantu perjuangan republik adalah suatu yang wajar. Sesudah ketua Majelis Luhur, Menteri pendidikan saat itu Bahder Johan menyatakan hormatnya kepada Taman Siswa dan pejuang-pejuangnya yang telah mempelopori pendidikan nasional.

4. Dampak Politik Pendidikan Taman Siswa bagi Indonesia

Seperti yang sudah dijelaskan di sub bab sebelumnya, Politik pendidikan diartikan sebagai pengambilan kebijakan dalam bidang

³⁸ Pusara Maret 1950, h.11

pendidikan dalam skala nasional maupun lokal. Taman Siswa sebagai organisasi yang berkonsentrasi di bidang pendidikan dan kebudayaan lalu sebagai organisasi yang memiliki anggota yang tersebar di banyak organisasi pergerakan yang kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin republik Indonesia, maka kurang lebih, sedikit banyak politik pendidikan Taman Siswa berpengaruh terhadap Indonesia.

Pengaruh yang dimaksud disini meliputi pengaruh baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan Indonesia, Penting sedikit mengulas pengaruh politik pendidikan Taman Siswa sebelum kemerdekaan guna melihat bahwasanya gagasan Taman Siswa yang dicetuskan sebelum kemerdekaan banyak memengaruhi politik pendidikan nasional. Keberadaan Taman Siswa sejak 1922 cukup banyak mempengaruhi pandangan pendidikan Indonesia baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Di bab sebelumnya sudah dijelaskan perihal keterlibatan Ki Hajar Dewantara dalam PPPKI. Dalam kongres tersebut Ki Hajar Dewantara menyerukan bahwa pendidikan harus bertujuan membina manusia yang merdeka, maka segala macam bantuan yang disertai ikatan harus ditolak karena akan mengurangi kemerdekaan itu sendiri. Hal itu diamini oleh anggota kongres dan diterjemahkan kedalam pembentukan CPN dan dana pendidikan yang dikelola oleh CPN.

Jika dilihat lebih jauh hal tersebut sudah dilaksanakan di dalam Taman Siswa, dan tertulis didalam Azas 1922 pasal 5 dan 6. Pasal 5 Merupakan asas yang sangat penting bagi semua orang yang ingin mengejar kemerdekaan hidup yang sepenuh-penuhnya. Pokok dari asas ini adalah percaya kepada kekuatan sendiri untuk tumbuh, dan pasal 6 berisi persyaratan dalam

mengejar kemerdekaan diri dengan jalan keharusan untuk membelanjai sendiri segala usaha itulah yang disebut *Zelfbedruipings-systeem*.³⁹

Sejak berdirinya Republik Indonesia, pendidikan merupakan titik tekan paling penting yang diprioritaskan oleh Republik Indonesia. Sebelum Republik Indonesia merdeka bersamaan dengan penyusunan Undang-Undang Dasar, bekerja pula dalam suatu “sub panitia pendidikan dan pengajaran” yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara menyusun rencana pengajaran bagi Indonesia merdeka nanti.

Ada beberapa rencana yang disusun oleh panitia yang telah lama digunakan di Taman Siswa seperti mengenai, Kebudayaan bangsa yang memang telah menjadi konsentrasi Taman Siswa. Dalam pasal tersebut dituliskan Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa.⁴⁰

Usaha kebudayaan harus menuju kemajuan adab budaya dan tidak menolak kebudayaan asing yang dapat memperkaya kebudayaan bangsa sendiri. Ki Hajar Dewantara sudah lama menerapkan hal itu di Taman Siswa. Menurut, Ki Hajar Dewantara pendidikan sebagai usaha kebudayaan. Bangsa ini dibesarkan oleh budaya dan pendidikan adalah alat mengembangkan

³⁹Kenji Tsuchiya, *Democracy and Leadership : The Rise of the Taman Siswa Movement in Indonesia*, terj. H.B. Jassin (Jakarta : Balai Pustaka, 1992), h.89

⁴⁰ M. Said, *Pendidikan Abad ke duapuluh dengan latar Belakang kebudayaan*(Jakarta: Mutiara, 1981) h,11

budaya.yang dikembangkan adalah budaya asli Indonesia, budaya asli Indonesia adalah puncak sari-sari dari kebudayaan lokal.⁴¹

Pengangkatan Ki Hajar Dewantara menjadi Menteri P. P. dan K menjadi langkah pertama republik untuk menciptakan sebuah sistem pendidikan yang sesuai dengan cita-cita republik yaitu mencerdaskan bangsa. Tindak-tanduk Ki Hajar Dewantara sudah teruji di Taman Siswa yang merupakan bagian dari kekecewaannya terhadap sistem pendidikan pemerintah kolonial Belanda. Melalui Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara bermaksud mewujudkan sistem pendidikan dan pengajaran yang “nasional”. “Nasional” dimaknai sebagai “untuk seluruh rakyat Indonesia” dan “kembali kepada milik sendiri”.

Pengajaran nasional itu pengajaran yang selaras dengan penghidupan bangsa dan kehidupan bangsa. Dalam konteks “nasional” itu Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya kemandirian dan hak mengatur diri sendiri.⁴² Oleh sebab itu, Ki Hajar Dewantara banyak menekankan kepada kebudayaan asli yang memang milik bangsa Indonesia. Dalam Taman Siswa Ki Hajar mengajarkan pentingnya pendidikan Jasmani dan pengajaran yang bertujuan mendidik pikiran. Hal tersebut diterapkan kepada murid-muridnya di Taman Siswa seperti yang ia bicarakan di majalah Wasita tahun 1930. Gagasan ini kemudian digunakan KNIP dalam menyusun usaha pembaruan dan realisasi pengajaran karena memang sedikit banyak Ki Hajar pun terlibat didalam penyusunan tersebut.

⁴¹ Wawancara dengan Ki Sunarno tanggal 12 April 2016 di Taman Siswa Jakarta

⁴² Agus Suwignyo, *Kurikulum yang mencerdaskan*, (Jakarta: Kompas,2008)